

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 45 TAHUN 2018.

TENTANG

PEMBEBASAN DARI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN PELAKSANA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA IMELDA.V. THIO

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian Kota Ambon tanggal 09 November 2017 Saudari Imelda.V. Thio, tidak masuk kantor tanpa pemberitahuan yang sah (Alpa) dari tanggal 11 Januari 2016 s/d 08 November 2017;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Imelda.V. Thio NIP. 19800616 200604 2 021.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645):
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 141);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 7. Perauran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Instruksi Walikota Ambon Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana

kepada:

Nama

Imelda.V. Thio

NIP

19800616 200604 2 021

Pangkat / Gol.Ruang

Penata Muda (III/a)

Unit Kerja

Dinas Kesehatan Kota Ambon

Karena yang bersangkutan melanggar pasal 3 angka 11 Peraturan

Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya dipindahkan

dari Dinas Kesehatan Kota Ambon ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Ambon sebagai pelaksana..

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan

perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 17 Januari 2018

OUHENAPESSY

Pemerintah

MAN AND A

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

- 3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- 4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
- 5. Inspektur Kota Ambon.
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
- 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
- 8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.
- 9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon.
- 10. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Ambon.
- 11. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon.